



Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Kepulauan Riau

2023



Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar
Pulau Dompok Seri Darul Makmur – Tanjungpinang Kode Pos 29124
Email : blhkepri@yahoo.com Website : <https://dlhk.kepriprov.go.id>

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023, dapat diselesaikan tepat waktu. (LKjIP) ini merupakan upaya perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang mengarah pada layanan yang professional dan kompeten.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023 ini disusun dalam rangka memenuhi :

1. Peraturan Presiden 29 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggung jawaban kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2023, sebagai konsistensi atas komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan salah satu pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

Sebagai bagian dari pertanggung jawaban, Laporan Kinerja ini disusun dengan menggunakan data realisasi kinerja yang mendukung analisis pencapaian sasaran serta pengukuran atas kegiatan, program dan sasaran

yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.

Tentu Kami menyadari bahwa laporan ini belumlah sempurna dalam menyajikan prinsip akuntabilitas dan transparansi seperti yang diharapkan, namun setidaknya pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil kinerja yang telah dilakukan oleh jajaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.

Akhirnya, kami berharap semoga laporan ini dapat memberi manfaat kepada banyak pihak dan berguna sebagai bahan masukan bagi pengelolaan, penataan serta peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, Februari 2024

KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI KEPULAUN RIAU,



HENDRI, S.T

Pembina Tk.I / IV.c

NIP. 19710501 200312 1 008

DAFTAR ISI

Ikhtisar Eksekutif.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Landasan Hukum	2
1.4 Tugas Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau	5
1.5 Sumber Daya Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau	8
1.6 Isu Strategis	14
1.7 Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	16
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	19
2.1 Rencana Program Kegiatan dan indikator kinerja	19
2.2 Perjanjian Kinerja DLHK Provinsi Kepulauan Riau	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
3.1 Capaian Kinerja	30
3.2 Realisasi Anggaran	48
BAB IV PENUTUP	75
L A M P I R A N	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2023	8
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menurut golongan dan jenis kelamin Tahun 2023	9
Tabel 1.3	Aset Inventaris Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau	10
Tabel 1.4	Permasalahan Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	15
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	21
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.....	24
Tabel 2.3	Program dan Anggaran Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau	24
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja pejabat Eselon III Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023	25
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau	26
Tabel 2.6	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023.....	27
Tabel 3.1	Skala pengukuran.....	30
Tabel 3.2	Evaluasi Pencapaian Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023.....	30
Tabel 3.3	Indikator dan Parameter IKLH.....	33
Tabel 3.4	Realisasi Kinerja serta capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 s/d 2023.....	34
Tabel 3.5	Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target RPJMD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.....	36
Tabel 3.6	Evaluasi pencapaian sasaran 5 (lima) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.....	46
Tabel 3.7	Realisasi Anggaran.....	48
Tabel 3.8	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Berdasarkan Program	64
Tabel 3.9	Realisasi anggaran per Sasaran.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau	8
-------------	--	---

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota), wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Sistem ini mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kepulauan Riau, berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur guna senantiasa membangun akuntabilitas sehingga tercipta penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berlangsung dengan bijaksana, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance yang bersih dan bebas korupsi, kolusi serta nepotisme.

Untuk pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan dan kewenangan dalam penyelenggaraan pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus dapat dipertanggungjawabkan, merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi dan dalam PermenPAN Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan pada tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini akan memberikan gambaran pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau dalam satu tahun anggaran beserta dengan hasil capaian indikator kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ada di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau didasarkan pada Permenpan Nomor 53 tahun 2014 sebagai pelaporan kinerja dan bentuk pertanggungjawaban untuk menilai keberhasilan dan kegagalan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau dalam mencapai sasaran Program yang wajib dipenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023.

Tujuan :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepri untuk meningkatkan kinerjanya.

1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
15. Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti dari Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun

- 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 49);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
 21. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816);

1.4. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau memiliki kedudukan sebagai Perangkat Daerah, merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi serta peraturan perundang-undangan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang melingkupi urusan lingkungan hidup dan kehutanan. Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau ini ditetapkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

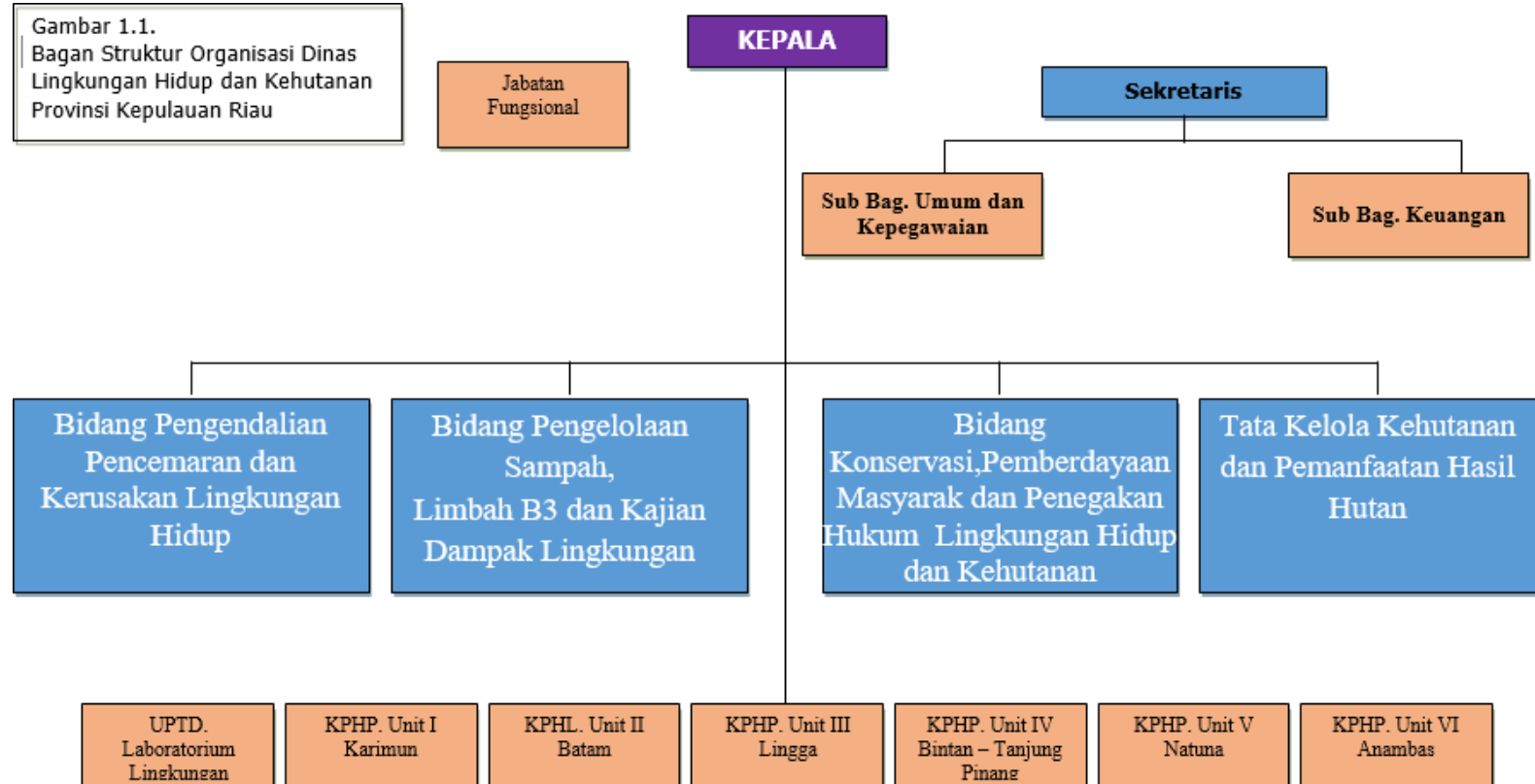
Adapun fungsi-fungsi yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau diantaranya sebagai berikut :

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. penyusunan perencanaan dan program di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- d. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan kajian dampak lingkungan;
- e. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang konservasi, pemberdayaan masyarakat dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- f. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang tata kelola kehutanan dan pemanfaatan hasil hutan;
- g. pengkoordinasian kebijakan teknis dengan instansi terkait; dan;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur.

Berdasarkan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari :

1. Sekretariat;
2. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
3. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Kajian Dampak Lingkungan;
4. Bidang Konservasi, Pemberdayaan Masyarakat dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Bidang Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Hasil Hutan;
6. UPTD Laboratorium Lingkungan;
7. UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Produksi Unit I Karimun;
8. UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Lindung Unit II Batam;
9. UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Produksi Unit III Lingga;
10. UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Produksi Unit IV Bintan -Tanjungpinang;
11. UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Produksi Unit V Natuna;
12. UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Produksi Unit VI Anambas;
13. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1.
Bagan Struktur Organisasi Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Kepulauan Riau



1.5. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

1. Sumber Daya Manusia

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau memiliki pegawai dengan 3 kelompok yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Tenaga Harian Lepas atau THL. Jumlah keseluruhan pegawai yang bertugas di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 185 pegawai. Jumlah pegawai tersebut terdiri dari pejabat eselon sebanyak 34 orang, staf PNS sebanyak 131 orang, staf PTT sebanyak 18 orang dan staf THL sebanyak 36 orang.

Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, memiliki tingkat pendidikan yang beragam, mulai tingkat pendidikan terendah (SMA) hingga tertinggi (S3).

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	PNS	PTT	THL	Jumlah
1	S3	-	-	-	-
2	S2	15	-	0	15
3	S1	61	12	11	84
4	D4	-	-	-	-
5	D3	6	1	4	11
6	D2	-	-	-	-
7	D1	-	-	-	-
8	SMA	49	5	16	70
9	SMP	-	-	2	2
10	SD	-	-	3	3
	Jumlah Total	131	18	36	185

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai golongan yang bervariasi dari Golongan II sampai dengan Golongan IV seperti disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menurut golongan dan jenis kelamin Tahun 2023

No	Pangkat/ Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pembina Utama (IV/e)	-	-	-
2	Pembina Utama Madya (IV/d)	-	-	-
3	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	-	-
4	Pembina Tk. I (IV/b)	4	-	4
5	Pembina (IV/a)	9	-	9
6	Penata Tk. I (III/d)	27	15	42
7	Penata (III/c)	8	5	13
8	Penata Muda Tk. I (III/b)	6	4	10
9	Penata Muda (III/a)	10	4	14
10	Pengatur Tk. I (II/d)	30	3	33
11	Pengatur (II/c)	4	1	1
12	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	-	-	-
13	Pengatur Muda (II/a)	1	-	1
14	Juru Tk. I (I/d)	-		
15	Juru (I/c)	-		
16	Juru Muda Tk. I (I/b)	-		
17	Juru Muda (I/a)	-		
	Jumlah Total	99	32	131

2. Sarana dan Prasarana

Berikut ini adalah daftar aset inventaris yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka penunjang operasional kedinasan.

Tabel 1.3. Aset Inventaris Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

No	Nama Barang	Jumlah Unit
1	AAS Attachment for HG Determination and 16 Lamp	1
2	AC Split	4
3	AC Unit	9
4	Air Conditioning Unit	7
5	Alat Dapur Lain-lain	30
6	Alat Destilasi Air	1
7	Alat Lab. Kimia Lain-Lain	1
8	Alat Lab. Kualitas Air & Tanah Lain-lain	4
9	Alat Lab. Kualitas Udara Lain-lain	4
10	ALat Lab. Lingkungan Lain-lain	69
11	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	55
12	Alat Pemdam Kebakaran Lain-lain	35
13	Alat Pemeliharaan Tanaman Lain-lain	1
14	Alat Pendingin Lain-lain	2
15	Alat Penggilingan Padi	1
16	Alat Penghancur Kertas	1
17	Alat Pengukur PH Tanah (Soil Tester)	2
18	Alat Penyimpanan Lain-lain	1
19	Alat Peraga Bahasa Indonesi Lain-lain	1
20	Alat Perlindungan Lain-lain	61
21	Alat Rumah Tangga Lain-lain	6
22	ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)	1
23	Amplifier	1
24	Anemometer	1
25	Anemometer Portable Digital	1
26	Audio Tape Reel Recorder	1
27	Automatic Timer	1
28	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2
29	Bangunan Gedung Laboratorium Lain-lain	1
30	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1
31	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Lain-lain	1
32	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	1
33	Beaker	1
34	Botol	100
35	Botol Pencuci	1

36	Botol Plastik	20
37	Buku Matematika & Pengetahuan Alam Lain-lain	1
38	Buku Umum Lain-lain	6
39	Burette	22
40	Camera + Attachment	4
41	Camera Electronic	15
42	Camera Photo Micrograph	1
43	Camera Video	2
44	Cardiac Output	110
45	Cawan Petri	20
46	Cawan Porselin	20
47	CCTV	8
48	Conductimeter	3
49	Conductivity Meter	3
50	Container	
51	CPU	2
52	Daun Pintu Aluminium	5
53	Dinding/Sekat Besi	2
54	Dinding/Sekat Gypsum	1
55	Dinding/Sekat Kayu	238
56	DO Meter	8
57	Dry Type Gas Meter	1
58	Dump Truck	6
59	Elektroda Tembaga (Voltmeter)	6
60	Emergency Kit	1
61	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	14
62	Erlenmeyer Plastik	26
63	Exhaust Fan	4
64	Filling Besi/Metal	21
65	Filter	3
66	Filtration Unit	1
67	Garu	18
68	Gas Sampler	2
69	Gedung Pos Jaga Permanen	7
70	Global Positioning System (GPS)	37
71	Gordyn	3
72	Handphone	2
73	Handy Talky	2
74	Handycam	2
75	Harddisk Internal	4
76	High Volume Air Sampler	1
77	Hot Plate Stirrer	1
78	Hub	3
79	Ilmu Pengetahuan umum	165
80	Instrument Probe/Sensor Lain-lain	2

81	Instrument Tray	5
82	Jeep	1
83	Kabel Listril	2
84	Kaca Riben	5
85	Karpet	3
86	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain	3
87	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	3
88	Keyboard	1
89	Kom pas	10
90	Konstruksi Pagar	1
91	Kursi Biasa	31
92	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	2
93	Kursi Kerja	65
94	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	8
95	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1
96	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2
97	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	9
98	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	9
99	Kursi Rapat	58
100	Kursi Rapat Pejabat Lain-lain	30
101	Kursi Ta mu	1
102	Labu Taka r	23
103	Lain-lain	1
104	Lap Top	35
105	Layar Proyektor	3
106	Lemari Arsip untuk a rsip Dinamis	13
107	Lemari Asam	1
108	Lemari Besi	1
109	Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain	3
110	Lemari Es	9
111	Lemari Kayu	1
112	Lemari Pakaian	1
113	Lemari Penyim panan	18
114	Loudspeaker	2
115	Magnetic Stripes & Bars	6
116	Masker Oksigen	15
117	Meja Besi/Metal	15
118	Meja Biro	16
119	Meja Kayu/Rotan	37
120	Meja Kerja	21
121	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	7
122	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1
123	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	6
124	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	8
125	Meja Makan	1
126	Meja Panjang	2

127	Meja Rapat	3
128	Mesin Absen (Time Recorder)	3
129	Mesin Absensi	1
130	Mesin Jahit	7
131	Mesin Ketik Listrik Portable	1
132	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	2
133	Mesin Pompa Air	2
134	Microphone	11
135	Modem	1
136	Monitor	1
137	Mouse	4
138	Multi Chanel Analyser	1
139	Neraca Dengan Digital Display	1
140	Note Book	31
141	P.C Unit/ Komputer PC	71
142	Pakaian Panas/Lengkap	7
143	Papan Nama Instansi	17
144	Papan Pengumuman	1
145	Peralatan Jaringan Lain-lain	16
146	Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	1
147	Peralatan Pemetaan Ukur Lain-lain	1
148	Perkakas Bengkel Kayu Lain-lain	8
149	Personal Komputer Lain-lain	2
150	Pesawat Telephone	1
151	PH Meter	7
152	Pick Up	4
153	Plankton Net	2
154	Plotter	2
155	Pocket Altimeter	1
156	Power Supply	2
157	Power Supply Microphone	1
158	Printer	82
159	Proyektor + Attachment	6
160	Rak Kayu	4
161	Rak-rak Penyimpanan	2
162	Refractometer	1
163	Remote Control Unit	1
164	Rol Meter	2
165	Router	1
166	Scanner	2
167	Sedan	3
168	Selang Penyemprot Air	13
169	Sepatu (International Safety Tester)	35
170	Sepeda Motor	44
171	Sofa	6
172	Sound Level Meter	1

173	Speaker Aktive Komputer	4
174	Spectrophotometer	1
175	Speed Boat	3
176	Station Wagon	1
177	Sumber Radiasi Lain-lain	1
178	Switch Hub	5
179	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1
180	Tanaman Perkebunan Lain-lain	1
181	Tandon Air	1
182	Telephone Mobile	1
183	Televisi	2
184	Teralis	1
185	Teropong	1
186	Thermometer	1
187	Timbangan	4
188	Turbidi Meter	2
189	UPS	23
190	UV/VIS Spectrophotometer	1
191	Water Sampler	2
192	Wireless Lan (Internal Card)	1
193	Wireless Lan (USB)	1

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

1.6. Isu Strategis

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Kepulauan Riau. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal.

Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau:

Tabel 1.4. Permasalahan Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Permasalahan Terkait Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Rendahnya tingkat ketaatan pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup	a. Penegakan hukum lingkungan yang belum terpadu antar sektor yang mengakibatkan lemahnya penegakan hukum b. Masih rendahnya kesadaran dalam menindaklanjuti ketentuan dalam dokumen lingkungan hidup
		2. Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	a. Kesadaran masyarakat dan pelaku industri akan penanganan limbah masih rendah sehingga terjadi pencemaran air, udara dan tanah b. Belum terkelolanya sampah dan limbah B3 secara optimal ditingkat masyarakat
		3. Rendahnya kapasitas SDM di bidang pengelolaan lingkungan hidup	a. Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup karena kurangnya kapasitas masyarakat yang memahami tentang permasalahan lingkungan dan penanganannya b. Belum terpenuhinya SDM laboratorium lingkungan sesuai dengan kuantitas dan terbatasnya sarana prasarana laboratorium c. Pelayanan pengujian laboratorium perlu ditingkatkan
		4. Kurangnya tutupan vegetasi dan belum optimalnya pengelolaan sumberdaya alam	a. Belum terkelolanya Daerah Aliran Sungai/DAS dengan baik b. Kondisi hutan yang masih rentan terhadap Gangguan c. Tingginya ancaman dan masih rendahnya kepedulian sebagian masyarakat terhadap keberadaan dan kelestarian sumber alam
		5. Belum optimalnya pengelolaan persampahan regional	a. Tidak sebandingnya volume sampah dengan sarana prasarana pengelolaan sampah di TPA b. Pengelolaan TPA yang belum optimal
		6. Pengembangan pembibitan tanaman kehutanan masih belum optimal	a. Minimnya ketersediaan bibit tanaman kehutanan yang berkualitas. b. Ketersediaan sumber benih berkualitas yang terbatas
2.	Rendahnya Nilai Produksi Kehutanan	1. Belum optimalnya perencanaan serta pembinaan usaha kehutanan	a. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya hutan baik potensi HHK (Hasil Hutan Kayu), HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu), potensi wisata dan jasa lingkungan di kawasan hutan sebagai salah satu faktor pengungkit untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. b. Pelaksanaan penatausahaan produksi hasil hutan yang masih belum sesuai dengan kondisi ideal. c. Masih ditemui di beberapa lokasi ketidakjelasan batas kawasan hutan dengan non kawasan hutan yang berpotensi adanya pembibitan lahan dan/atau okupasi lahan
		2. Pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung di Kepri belum optimal	a. Rasio pemanfaatan hutan yang masih belum optimal. b. Adanya gangguan terhadap sumberdaya hutan baik gangguan alam maupun manusia.

			c. Kondisi tegakan hutan di Yogyakarta sebagian besar didominasi tegakan umur muda dan jumlah batang per hektar di bawah standar normal/optimal
		3. Rendahnya terkelolanya konservasi presentase hutan	a. Upaya konservasi, rehabilitasi, dan pengkayaan sumberdaya hutan dalam pemenuhan keseimbangan lingkungan masih perlu ditingkatkan. b. Pemanfaatan fungsi hutan untuk pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pariwisata, dan pendidikan oleh pemerintah dan warga masyarakat belum optimal

1.7. Sistematika Penyusunan Laporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Proses pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari tahap persiapan yaitu penyiapan data dan informasi, sampai tersusunnya laporan LAKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam laporan akuntabilitas kinerja ini disajikan pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat strategis, yaitu program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023. Capaian kinerja individual per kegiatan sesuai data yang tersedia terbatas pada indikator input, output dan sebagian outcome. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini juga mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan tahun 2023. Selanjutnya capaian kinerja (performance results) kegiatan-kegiatan tahun 2023 diperbandingkan dengan rencana kinerja (performance plan) tahun 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi

Uraian singkat dari masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II – Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang Bersangkutan

Bab III – Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;

Bab IV – Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Program, Kegiatan dan Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

Sebagai langkah lebih lanjut dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, Adapun visi dan misi Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

Visi dan Misi

✓ Visi

Visi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 : **"Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya"**.

✓ Misi

Dalam rangka mewujudkan visi **" Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya"**, misi yang yang ditempuh sebanyak 5 (lima) misi, yaitu sebagai berikut :

1. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat
2. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan
3. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasiskan Iman dan Taqwa.
4. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan
5. Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan

Langkah lebih lanjut dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut maka perlu penjabaran strategi pembangunan ke dalam program dan kegiatan. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh instansi atau beberapa instansi terkait dalam rangka

melibatkan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran dari program dan kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) 90 tahun 2019 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.

Mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026 dan Renscana Strategi (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi kepulauan Riau, maka program yang dilaksanakan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. **Program Perencanaan Lingkungan Hidup**
2. **Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**
3. **Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).**
4. **Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**
5. **Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**
6. **Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**
7. **Program Pengelolaan Persampahan**
8. **Program Pengelolaan Hutan**

9. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

Adapun indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut (Tabel 2.1) :

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026
			2021	2022	2023	2024	2025	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67,00	69,47	69,73	69,95	70,18	70,28	70,38
2	Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah	N/A	20	20	20	100	100	100
3	Indeks Kualitas Air Laut	N/A	76.10	76.75	77.39	78.04	78.04	78.04
4	Indeks Kualitas Air	54,00	56,60	56,70	56,80	56,90	56,90	56,90
5	Indeks Kualitas Udara Ambien	90,59	88,14	88,25	88,35	88,46	88,46	88,46
6	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	59,06	59,07	59,08	59,09	59,10	59,10	59,10
7	Persentase ketersediaan data Keanekaragaman Hayati di Provinsi Kepulauan Riau	0	0	14,28	14,28	-	-	-
8	Persentase Izin Pengelolaan Limbah B3 yang diawasi	20	26,27	33,33	33,33	40,00	40,00	46,67
9	Tingkat kepatuhan terhadap regulasi	100	100	100	100	100	100	100
10	Persentase Kab/Kota yang meraih Penghargaan	0	28,57	42,85	57,14	71,43	71,43	71,43
11	Persentase Perusahaan yang Taat Aturan	100	100	100	100	100	100	100
12	Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	83,33	57,14	57,14	71,43	100	100	100
13	Persentase	22	24	26	27	28	30	30

No	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2026
			2021	2022	2023	2024	2025	
	Pengurangan Sampah							
14	Persentase Penanganan Sampah	75	73	73	72	71	70	70
15	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB harga berlaku	25,31	27,00	27,10	27,20	27,32	27,41	27,50
16	Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan	25,31	27,00	27,10	27,20	27,32	27,41	27,50
17	Rehabilitasi Lahan Kritis	5	5	5	5	5	5	5
18	Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat	88	500	500	500	-	-	-
19	Jumlah akses pengelolaan hutan oleh masyarakat (Kelompok)					30	30	30
20	Meningkatnya Kesehatan Daerah Aliran Sungai Kepulauan Riau	2	2	2	2	-	-	-
21	Jumlah Kesehatan Daerah Aliran Sungai Kepulauan Riau (DAS)					2	2	2
22	Nilai SAKIP	B	B	B	B	B	B	B

Ada beberapa isu strategis di Provinsi Kepulauan Riau yang terkait dengan urusan lingkungan hidup dan kehutanan antara lain :

1. Permasalahan Terkait Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;

Adapun masalah yang terkait dengan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ;

- Sebagian waduk di wilayah Kepulauan Riau memiliki status air tercemar sedang
- Menurunnya kualitas udara akibat bencana asap kebakaran hutan
- Meningkatnya pencemaran laut dan pantai di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau

2. Permasalahan Terkait Konservasi, Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Adapun masalah yang terkait dengan Konservasi, Peningkatan Kapasitas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah ;

- Meluasnya lahan kritis akibat penambangan dan perluasan kawasan industri
- Masih rendahnya cakupan rehabilitasi dibanding luas areal kerusakan lahan.
- Kerusakan terumbu karang dan lamun di kawasan pesisir
- Terjadinya kerusakan hutan mangrove
- Kerentanan Provinsi Kepulauan Riau wilayahnya terhadap terjadinya perubahan iklim
- Terbatasnya luasan Ruang Terbuka Hijau
- Masih adanya pengaduan masalah lingkungan yang belum terselesaikan

3. Permasalahan Terkait Tata Kelola Kehutanan dan Kajian Dampak Lingkungan;

Adapun masalah yang terkait dengan Tata Kelola Kehutanan dan Kajian Dampak Lingkungan adalah ;

- Tingginya tingkat kerusakan kawasan hutan yang diakibatkan oleh aktivitas ilegal logging, perladangan berpindah, dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah
- Belum adanya Persetujuan DPR RI pada usulan perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dengan cakupan yang luas dan bernilai strategis (DPCLS) seluas ± 23.872 Ha yang telah disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sebagai dasar terbitnya perubahan Keputusan terkait kawasan hutan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau
- Masih adanya usaha industri kayu yang belum memiliki sertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu
- Belum beroperasinya Kesatuan Pengelolaah (KPH) sebagai pengelola kawasan hutan di tingkat tapak
- Masih terdapat pelaku usaha yang belum memiliki dokumen lingkungan

4. Permasalahan terkait Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas

Adapun masalah yang terkait dengan Permasalahan terkait Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas adalah ;

- Meningkatnya produksi sampah rumah tangga dan belum optimalnya pengelolaan sampah oleh kabupaten/kota
- Belum tersedianya TPA regional dan sarana prasarana pendukungnya

terutama di Pulau Bintan

Ada beberapa isu strategis di Provinsi Kepulauan Riau yang terkait dengan urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan antara lain :

1. Meningkatnya pencemaran lingkungan perairan akibat pembuangan limbah sludge oil
2. Menurunnya kualitas udara akibat bencana asap kebakaran hutan.
3. Luasnya lahan kritis akibat penambangan dan perluasan kawasan industri
4. Terjadinya kerusakan pada kawasan hutan

2.2. Perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 dapat disajikan pada tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

No.	Sasaran Strategis	Indikator Strategis	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menurunnya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,95
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Lestari	PDRB Sektor Kehutanan (Milyar/Rp)	27,20
		Meningkatnya Akses Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat (Hektar)	500

Adapun program yang mendukung dalam rangka mencapai kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3. Program dan Anggaran Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	29.264.021.450,00	APBD
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	439.140.835,00	APBD
3. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	250.000.000,00	APBD
4. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	55.240.700,00	APBD

Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
5. Program pengelolaan persampahan	246.147.805,00	APBD
6. Program Pengelolaan Hutan	472.448.079,00	APBD
7. Program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	698.494.000,00	APBD
8. Program Pengelolaan DAS	35.906.000,00	APBD

Untuk perjanjian kinerja pejabat eselon III Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023, dapat dilihat dari tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja pejabat Eselon III Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Sasaran Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			
1	Menurunnya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,95
2	Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Lestari	PDRB Sektor Kehutanan (Milyaran/Rp)	27,20
		Meningkatnya Akses pengelolaan Hutan oleh Masyarakat (hektar)	500
Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah / <ul style="list-style-type: none">Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat DaerahEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Capaian Kinerja OPD <ul style="list-style-type: none">Tersedianya Renja dan Lakip OPD dan Tersedianya Renstra OPDKoordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	12 Bulan 2 Dokumen 1 Dokumen
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan, serta Administrasi Keuangan ASN	12 Bulan
3.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	12 Bulan
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	1 Tahun
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup			
1	Meningkatnya Kualitas Air Laut	Indeks Kualitas Air Laut	77,39
2	Meningkatnya Kualitas Air Baku	Indeks Kualitas Air	56,80
3	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	88,35
4	Terlaksananya Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan dampak/risiko LH	Tersedianya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Kepulauan Riau	1 Laporan
5	Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD/RPJMD	Tersedianya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Kepri	1 Dokumen

No	Sasaran Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
6	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Terlaksananya pengamatan air bersih, udara ambien, tutupan lahan, dan air laut Tersedianya peralatan AQMS	1 Laporan
7	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Tersedianya Penyusunan Inventarisasi GRK dan Pembinaan Kampung Iklim	1 Laporan
8	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Perusahaan yang dinilai kinerjanya dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup	10 Perusahaan
9	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor	12 Bulan
Bidang Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 Dan Kajian Dampak Lingkungan			
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Terlaksananya penyediaan prasarana dan sarana TPA di Provinsi Kepulauan Riau	1 Paket
Bidang Konservasi, Pemberdayaan Masyarakat dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan			
1.	Meningkatnya Pendampingan dan Pengembangan Perhutanan Sosial pada KPH	Luas kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	4 Ha
2.	Terlaksananya pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Persentase penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup	71,43 %
3	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan DAS	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pengelolaan DAS	2 kali
4	Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1 Laporan
5	Terpenuhinya reabilitasi di luar kawasan Hutan Negara	Laporan atas hasil pembinaan dan /atau pengawasan rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan
Bidang Tata Kelola Kehutanan dan Pemanfaatan Hasil Hutan			
1.	Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Isin Usaha Atau Kerjasama Pemanfaatan Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen
2.	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah dokumen pelaksanaan pembinaan pengendalian dan pengawasan PBPHH (kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	3 Dokumen

2.3. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama ditetapkan sebagai penilaian setiap Perangkat Daerah (PD) dalam mencapai sasaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan dana/anggaran yang tersedia. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

Tabel 2.5. Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Keterangan
1.	Menurunnya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	$IKLH = (IKA \times 30\%) + (IKU \times 30\%) + (IKTL \times 40\%)$
2	Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Lestari	PDRB Sektor Kehutanan terhadap PDRB Harga berlaku (Miliar)	27,20

Program dan kegiatan merupakan penjabaran dari sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra serta pelaksanaan program dan kegiatan merupakan langkah awal dalam proses akutabilitas dimana pelaksanaan program dan kegiatan ini akan dilakukan pengukuran kinerja sesuai dengan pendanaan yang tersedia.

Tabel 2.6. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023

Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Kegiatan : Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	439.140.835,00
	Sub Kegiatan : Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	439.140.835,00
Program Penanganan pengaduan Lingkungan Hidup	Kegiatan : Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	55.240.700,00
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	55.240.700,00
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	0
	Sub Kegiatan : Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut	0
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	0
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	489.135.412,00
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Kegiatan : Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	250.000.000,00
	Sub Kegiatan : Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	250.000.000,00
Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
Program Pengelolaan Persampahan	Kegiatan : Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	

	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	246.147.805
Program Pengelolaan Hutan	Kegiatan : Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	109.100.192,00
	Sub Kegiatan : • Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi • Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	87.393.676,00 21.706.516,00
	Kegiatan : Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	297.035.500,00
	Sub Kegiatan : Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	297.035.500,00
	Kegiatan : Pelaksanaan Pengelolaan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	38.499.787,00
	Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	38.499.787,00
	Kegiatan : Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	27.812600,00
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan / Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	27.812600,00
Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	698.494.000,00
	Sub Kegiatan : Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	323.577.100,00
	Sub Kegiatan : Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	374.916.900,00
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Kegiatan : Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	698.494.000,00
	Sub Kegiatan : Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	323.577.100,00

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran Visi dan Misi Provinsi Kepulauan Riau.

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau yang telah dicapai maupun kegagalan pada periode/ tahun tertentu.

Pengukuran tingkat capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kebijakan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan strategi OPD. Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik, komponen, realisasi dan kondisi :

1. Indikator dengan progress positif adalah indikator dengan realisasi semakin tinggi realisasi menunjukkan capaian kinerja yang semakin baik, maka menggunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian kinerja Indikator} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2. Indikator dengan progress negatif adalah indikator dengan semakin tinggi realisasi menunjukkan rendahnya capaian kinerja, maka menggunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian kinerja Indikator} = \frac{\text{Realisasi} (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Pengukuran

No	Katagori	Katagori Capaian
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi (ST)
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi (T)
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang (S)
4	$51\% \leq 75\%$	Rendah (R)
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah (SR)

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

Untuk pencapaian kinerja organisasi berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Rencana Strategis (renstra) 2021 – 2026 selama 5 tahun dapat dilihat dari tabel berikut ini :

3.1.1 Membandingkan Capaian kinerja antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Berikut ini adalah capaian kinerja antara target dan realisasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023.

Tabel 3.2 Evaluasi Pencapaian antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Capaian Tahun 2023	Keterangan
			Target	Realisasi		
1.	Menurunnya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi (Indeks)	69,95	74.26	106,16%	Sangat Tinggi
		Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah	20%	20%	100%	Sangat Tinggi
		Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	77.39 Indeks	81.81 Indeks	105,71%	Sangat Tinggi
		Indeks Kualitas Air (IKA)	56,80 Indeks	54.93 Indeks	96,71%	Sangat Tinggi
		Indeks Kualitas Udara Ambien (IKU)	88,35 Indeks	90.13 Indeks	102,01%	Sangat Tinggi
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	59,09 Indeks	66.97 Indeks	113,33%	Sangat Tinggi
		Persentase ketersediaan data Keanekaragaman Hayati di Provinsi Kepulauan Riau	28.57%	50,00%	175,01%	Sangat Tinggi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Capaian Tahun 2023	Keterangan
			Target	Realisasi		
		Persentase Izin Pengelolaan Limbah B3 yang diawasi	40%	50%	125%	Sangat Tinggi
		Tingkat kepatuhan terhadap regulasi	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Persentase Kab/Kota yang meraih Penghargaan	71.43%	71,43 %	100%	Sangat Tinggi
		Persentase Perusahaan yang Taat Aturan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	71,43%	100%	140%	Sangat Tinggi
		Persentase Pengurangan Sampah	27%	18,02%	69,28%	Sedang
		Persentase Penanganan Sampah	72%	72,55%	100,76%	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Lestari	Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan (milyar rupiah)	27,20	25,99	95,55%	Sangat Tinggi
		Rehabilitasi Lahan Kritis	5 Ha	302 Ha	6.040 %	Sangat Baik
		Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat	500 Ha	1.411 Ha	282,2 %	Sangat Baik
		Meningkatnya Kesehatan Daerah Aliran Sungai Kepulauan Ria	2 DAS	2 DAS	100%	Sangat Baik
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas LInggungan Hidup dan kehutanan	Nilai SAKIP	B	BB	104,22%	Sangat Baik

Dari tabel 3.2 di atas, dapat dilihat realisasi pencapaian indikator kinerja secara keseluruhan mencapai target bahkan ada yang melebihi dari target dan ada belum tercapai targetnya tetapi capaian kinerjanya sudah baik diantaranya adalah :

- Indeks Kualitas Air
- Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan
- Persentase Pengurangan Sampah

Dari tabel diatas terlihat bahwa dari indikator sasaran kinerja utama yang telah ditargetkan pada tahun 2023 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terealisasi mencapai 106,16 %. Sedangkan indikator meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan (dalam milyar rupiah) terealisasi 99,70 %. dengan penjelasan capaian masing-masing indikator sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran 1 : Mewujudkan Penurunan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

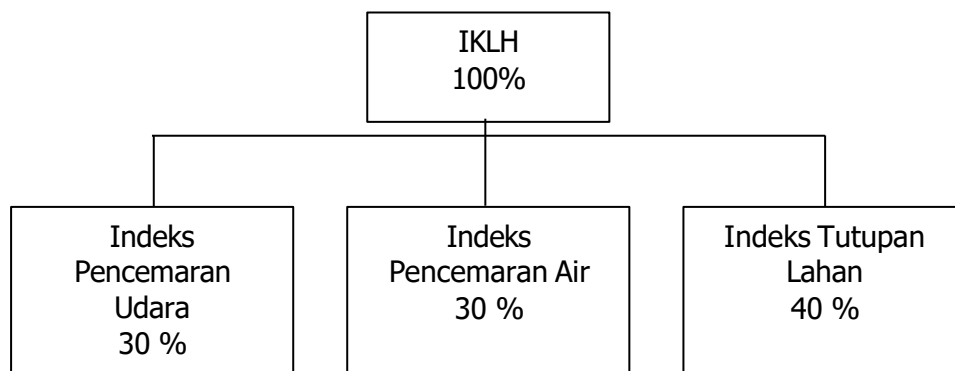
Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran, Target dan Realisasi Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2023

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	69,95	74.26	106,16%

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Dengan cara mengetahui media lingkungan yang masih kurang baik, sumber daya yang ada dapat dialokasikan secara lebih tepat sehingga akan lebih efektif dan efisien.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang diadopsi oleh Kementerian Lingkungan Hidup adalah pengembangan dari konsep yang dikembangkan oleh Virginia Commonwealth University (VCU) dan BPS dengan menggunakan kualitas air, kualitas udara dan tutupan hutan sebagai indikator. Penggabungan parameter ini dimungkinkan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Pencemaran Udara.

Struktur IKLH terdiri dari 4 (empat) indikator, hal ini mengingat perlu adanya keseimbangan antara indikator yang mewakili green issues (isu hijau) dan brown issues (isu coklat).



Tabel 3.4 Indikator dan Parameter IKLH

No	Indikator	Parameter	Bobot	Keterangan
1	Kualitas Udara	SO ₂	30%	
		NO ₂		
2	Kualitas Air	TSS	30%	Dihitung Indkes Pencemaran Air (IPA)
		BOD		
		COD		
		DO		
		Fosfat		
		Total coli		
		Fecal coli		
3	Tutupan Hutan	Luas Lahan	40%	

Perhitungan IKLH dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$IKLH = (IKA \times 30\%) + (IKU \times 30\%) + (IKTL \times 40\%)$$

Mulai tahun 2020, indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 4 indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Air (IKA) yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, pH, DO, BOD, COD, Total Fosfat, NO₃, dan Fecal Coli; (2) Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter SO₂ dan NO₂; (3) Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan dan semak belukar dalam kawasan hutan, kawasan fungsi lindung; dan (4) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) yang diukur berdasarkan parameter TSS, DO, Minyak dan Lemak, Amonia Total, dan Orto-Fosfat.

Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

IKLH Kabupaten/ Kota	$IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$
IKLH Provinsi	$IKLH = (0.340 \times IKA) + (0.428 \times IKU) + (0.133 \times IKL) + (0.099 \times IKAL)$
IKLH Nasional	$IKLH = (0.340 \times IKA) + (0.428 \times IKU) + (0.133 \times IKL) + (0.099 \times IKAL)$

2. Capaian Indikator Meningkatnya PDRB Sub Sektor Kehutanan (dalam milyar rupiah)

Sasaran 2 : Meningkatkan Pemanfaatan Hutan Lestari

Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Sasaran, Target dan Realisasi Kinerja meningkatnya PDRB Sub Sektor Kehutanan Tahun 2023

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Kontribusi Sektor kehutanan terhadap PDRB Harga Berlaku	Milyar Rp	27,20	25,99	95,55 %
Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat	Hektar (Ha)	500	1.411	282,2 %

Ada 2 (dua) indikator untuk meningkatkan optimalisasi pemanfaatan hutan lestari yaitu kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB dan meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat. Pada tahun 2023 target indikator kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB 27,20 dengan realisasi 25,99 dengan capaian kinerja 95,55 %. Sedangkan untuk indikator meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat target yang ditetapkan 500 hektar dengan realisasi sebesar 1.411 hektar dan capaian kinerja sebesar 282,2 %.

Program yang mendukung indikator kontribusi kinerja sasaran Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dan indikator meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat adalah program pengelolaan hutan sedangkan kegiatan yang mendukung ada 4 (empat) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan yaitu :

1. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung
2. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
 - Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan
3. Pelaksanaan Pengelolaan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/Tahun
 - Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/Tahun
4. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan / Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Tabel 3.5 Data Jumlah lahan yang dimanfaatkan oleh Kelompok Tani Hutan

NO	SKEMA	PROVINSI	KAB / KOTA	KECAMATAN / DESA	NAMA KELOMPOK	LUAS	JUMLAH SK	JLH KK	SK		JUMLAH LAHAN YANG DIMANFAATKAN (Ha)
						(Ha)			NO SK	TGL SK	
1	HTR	KEP RIAU	KARIMUN	Kec. Buru, Kec. Durai, Kec. karimun, Kec. Kundur dan Kec. Moro	Koperasi Wana Jaya Karimun	9,335	1	934	192 Tahun 2010	11/04/2010	467
2	HTR	KEP RIAU	LINGGA	Kec. Singkep/Kel. Dabo Lama	Koperasi Mangrove Lestari Indah Lingga	12,195	1	122	SK.145-174/KPTS/2011	29/03/2011	61
3	HKM	KEP RIAU	NATUNA	Bunguran Timur / Batu Gajah	KT. Makmur Jaya	2,520	1	22	SK.673/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/2/2017	23/02/2017	10
4	HKM	KEP RIAU	NATUNA	Bunguran Timur Laut / Ceruk	Gapoktan Lappan	69	1	113	SK.672/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/2/2017	23/02/2017	35
5	HTR	KEP RIAU	BINTAN	Teluk Sebong / Ekang Anculai	KTH Karya Sejahtera Bersama	96	1	22	SK.5922/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2018	14/09/2018	22
6	HTR	KEP RIAU	BINTAN	Teluk Bintan / Tembeling	KTH Bintan Pesisir Lestari	407	1	37	SK. 5621/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2018	9/04/2018	37
7	HTR	KEP RIAU	BINTAN	Gunung Kijang / Kel. Kawal	KTH Kawal Buana Lestari	470	1	27	SK. 5628/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2018	9/04/2018	27
8	HTR	KEP RIAU	BINTAN	Sri Kuala Lobam / Busung	KTH Busung Raya Mandiri	286	1	27	SK. 5629/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2018	9/04/2018	27
9	HKM	KEPRI	TANJUNGPINANG	Tanjungpinang Timur/Pinang Kencana	KTH Sumber Rejeki	342	1	54	SK. 5964/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2018	19/09/2018	41
10	HKM	KEP RIAU	KOTA BATAM	Batu Aji / Kel. Kibing	KTH Purwolestari	199	1	46	SK. 7674/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2018	23/10/2018	92
11	HKM	KEP RIAU	KOTA BATAM	Sekupang / Kel. Tanjung Riau	KTH Harapan Sukses	63	1	50	SK. 7664/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2018	23/10/2018	50

12	HKM	KEP RIAU	KOTA BATAM	Sekupang / Kel. Tanjung Riau	KTH Mandiri Bersama	255	1	20	SK. 7673/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2018	23/10/2018	20
13	HKM	KEP RIAU	KARIMUN	Meral Barat/Darussalam	KTH Makmur Sentosa	119	1	26	SK.8754/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018	27/12/2018	26
14	HKM	KEP RIAU	KARIMUN	Meral Barat/Pasir Panjang	KTH Wanabakti	113	1	24	SK.8531/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018	12/12/2018	24
15	HD	KEP RIAU	KARIMUN	Tebing/Pongkar	HPHD Pongkar	50	1	-	SK.9207/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018	31/12/2018	10
16	HKM	KEP RIAU	LINGGA	Lingga Utara / Resun	KT Berkah	61	1	25	SK. 5419/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2018	27/08/2018	25
17	HKM	KEP RIAU	KEPULAUAN ANAMBAS	Siantan / Tarempa Selatan	KTH Karya Bersama	81	1	58	SK. 5473/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2018	27/08/2018	29
18	HD	KEP RIAU	NATUNA	Bunguran Barat/Mekar jaya	LPHD Mekar Jaya	1,766	1	-	SK.6244/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2019	7/11/2019	45
19	HKm	KEP RIAU	NATUNA	Bunguran Selatan/Cemaga Selatan	KTH Ingin Maju	3,537	1	173	SK.6241/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2019	7/11/2019	87
20	HKm	KEP RIAU	KARIMUN	Kundur Barat/Sawang Selatan	KTH Sakti Mandiri	147	1	19	SK.7382/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2019	9/09/2019	29
21	HKm	KEP RIAU	KARIMUN	Kundur Barat/Gemuruh	KTH Gemuruh	28	1	18	SK. 7588/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2019	19/09/2019	18
22	HKm	KEP RIAU	BINTAN	Bintan Utara / Tanjung Uban Utara	KTH Maju Bersama	77	1	37	SK. 7594/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2019	20/09/2019	37
23	HKm	KEP RIAU	NATUNA	Bunguran/ Cemaga Selatan	KTH Cinta Damai	88	1	37	SK. 827/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/2/2020	26/02/2020	28
24	HKm	KEP RIAU	KOTA BATAM	Kecamatan Sungai Beduk/Kelurahan Mangsang	KTH Gapoktan Mangsang Bersatu	312	1	240	SK. 367/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/1/2021	26/01/2021	85
25	HKm	KEP RIAU	KOTA BATAM	Nongsa/Batu Besar	Kelompok Wisata Mangrove	79	1	15	SK. 371/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/1/2021	26/01/2021	15

26	HD	KEP RIAU	BINTAN	Bintan Utara / Lancang Kuning	LPHD Lancang Kuning	66	1	-	SK. 1526/MENLHK- PSKL/PKPS/PSL.0/3/2021	30/03/2021	10
27	HKm	KEP RIAU	BATAM	Sungai Beduk / Tanjung Piayu	Kelompok Tani Tambak Hutan Mangrove	79	1	27	SK. 1267/MENLHK- PSKL/PKPS/PSL.0/3/2021	30/03/2021	27
28	HKm	KEP RIAU	BINTAN	Kecamatan Bintan Utara/Kelurahan Tanjung Uban Selatan	KTH Nelayan Tambak Bintan	6	1	17	SK. 1470/MENLHK- PSKL/PKPS/PSL.0/3/2021	30/03/2021	3
29	HKm	KEP RIAU	KOTA BATAM	Batuaji/Buliang	KTH Bukit Mata Kucing Lestari	159	1	24	SK. 1266/MENLHK- PSKL/PKPS/PSL.0/3/2021	30/03/2021	24
30	HKm	KEP RIAU	KOTA BATAM	Bulang/ Kelurahan Setokok	Kelompok Masyarakat Kampung Wisata Mangrove	56	1	24	SK.5221/MENLHK- PSKL/PKPS/PSL.0/5/2023	15/05/2023	0
JUMLAH						33,061	30	3.336			1,411

3. Capaian Indikator Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas LIngkungan Hidup dan kehutanan

Sasaran 3 : Nilai saki

Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja Sasaran, Target dan Realisasi Kinerja meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Kontribusi Sektor kehutanan terhadap PDRB Harga Berlaku	Nilai	B	71,55 (BB)	104,22 %

Secara umum indikator kinerja sasaran pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 sudah tercapai dengan baik. Adapun capaian indikator kinerja sasaran dari tahun 2023 seperti tabel berikut :

Tabel 3.7 Indikator Kinerja Sasaran, Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Capaian Tahun 2023	Keterangan
			Target	Realisasi		
1.	Menurunnya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	69,95 Indeks	74.26 Indeks	106,16%	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Lestari	Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan (dalam milyar rupiah)	27,20	25,99	95,55%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas LIngkungan Hidup dan kehutanan	Nilai SAKIP	B	BB	104,22%	Sangat Tinggi

3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan tahun 2023 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (2021 dan 2023)

Berikut ini adalah capaian kinerja antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (2021 s/d 2023).

Tabel 3.4 Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 s/d 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja		
			2021	2022	2023
1.	Menurunnya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	73,19 Indeks	74,13 Indeks	74.26 Indeks
		Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah	100 %	50 %	20 %
		Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	75,68 Indeks	85,56 Indeks	81.81 Indeks
		Indeks Kualitas Air (IKA)	55,15 Indeks	56,79 Indeks	54.93 Indeks
		Indeks Kualitas Udara Ambien (IKU)	90,91 Indeks	90,27 Indeks	90.13 Indeks
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	60,39 Indeks	58,00 Indeks	66.97 Indeks
		Persentase ketersediaan data Keanekaragaman Hayati di Provinsi Kepulauan Riau	0	50%	50%
		Persentase Izin Pengelolaan Limbah B3 yang diawasi	26,67 %	40 %	50 %
		Tingkat kepatuhan terhadap regulasi	100 %	100 %	100 %
		Persentase Kab/Kota yang meraih Penghargaan	28,57 %	42,85 %	71,43%
		Persentase Perusahaan yang Taat Aturan	100 %	100 %	100 %
		Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	80 %	100 %	100 %
		Persentase Pengurangan Sampah	24 %	12,85 %	18,02 %
		Persentase Penanganan Sampah	74 %	72,32 %	72,55 %
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Lestari	Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan (dalam milyar rupiah)	28,347	27,12	25,99
		Rehabilitasi Lahan Kritis	5	330	302 Ha
		Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat	500	500	1.411
		Meningkatnya Kesehatan Daerah Aliran Sungai Kepulauan Ria	2 DAS	2 DAS	2 DAS

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja		
			2021	2022	2023
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan	Nilai SAKIP	BB	BB	BB

Berdasarkan tabel diatas, realisasi kinerja sasaran pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 secara umum sangat baik untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup. Hal ini menunjukkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau juga sangat baik. Indikator ke-1 dan ke-2 yaitu Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan sebesar 25,99 Milyar Rupiah. Persentase Pengurangan Sampah sebesar 18,02%

3.1.3 Tabel 3.8 Evaluasi Pencapaian Sasaran 5 tahun Berjalan dengan tahun Sebelumnya

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	68,90	66.50	96,52	69,20	67,00	96,82	69,80	73,19	104,86	69,73	74,13	106,31	69.73	74.26	106,16%
2	Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah	-		-	-	-	-	-	-	-	20	50	250	20 %	20%	100%
3	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	76,10	-	76,75	85,56	111,48	76,75	81.81	105,71%
4	Indeks Kualitas Air (IKA)	N/A	57,85	-	N/A	54,00	-	-	56,60	-	56,70	56,79	100,16	56,70	54.93	96,71%
5	Indeks Kualitas Udara Ambien (IKU)	N/A	90,83	-	N/A	90,59	-	-	88,14	-	88,25	90,27	102,29	88,25	90.13	102,01%
6	Indeks Kualitas Lahan (IKTL)	-	54.75	-	-	59,06	-	-	59,07	-	59,08	58,00	98,17	59,08	66.97	113,33%
7	Persentase ketersediaan data Keanekaragaman Hayati di Provinsi Kepulauan Riau	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14,28	25,00	175,01%	28.57%	50	175,01%
8	Persentase Izin Pengelolaan Limbah B3 yang diawasi	N/A	N/A	N/A	N/A	20	N/A	N/A	26,67	N/A	33,33	40	120,01	40%	50%	125%
9	Tingkat kepatuhan terhadap regulasi	N/A	N/A	N/A	N/A	100	-	100	100	100	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%
10	Persentase Kab/ Kota yang meraih Penghargaan	N/A	85,71	N/A	N/A	100	N/A	N/A	26,57	-	42,85 %	42,85 %	100 %	71.43%	71,43	100%
11	Persentase Perusahaan yang Taat Aturan	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	100	100	100	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%
12	Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	N/A	N/A	N/A	N/A	83,33	N/A	N/A	57,14	N/A	57,14 %	100 %	175,01 %	71,43%	100%	140%
13	Persentase Pengurangan Sampah	N/A	N/A	N/A	N/A	20	N/A	N/A	24	N/A	26 %	14,82	57,00 %	27 %	18,02%	69,28%
14	Persentase Penanganan Sampah	N/A	N/A	N/A	N/A	75	N/A	N/A	74	N/A	73 %	74,42 %	99,21 %	72 %	72,55%	100,76%
15	Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan (dalam milyar rupiah)	-	25,27	-	-	26,90	-	-	28,34	-	27,10	27,12	100,07 %	27,20	25,99	95,55%
16	Rehabilitasi Lahan Kritis	225	400	177,7	230	300	130,4	230	300	130,4	5	330	6.600 %	5 Ha	302 Ha	6040%
17	Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh Masyarakat	N/A	N/A	N/A	N/A	88,00	N/A	N/A	500	N/A	500	500	100 %	500 Ha	1.411	282,2 %

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
18	Meningkatnya Kesehatan Daerah Aliran Sungai Kepulauan Ria	N/A	N/A	N/A	N/A	2 DAS	N/A	N/A	2 DAS	N/A	2 DAS	2 DAS	100 %	2 DAS	2 DAS	100%
19	Nilai SAKIP	N/A	B	N/A	N/A	B	N/A	B	BB	B	B	B	B	B	BB	104,22%

Dari tabel 3.8 di atas, dapat dilihat bahwa pencapaian indikator kinerja tahun 2023 rata-rata tercapai melebihi target, namun ada juga indikator kinerja dibawah target diantaranya ;

- Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan sebesar 25,99
- Persentase Pengurangan Sampah sebesar 18,02%

Untuk persentase pengurangan sampah dikarenakan ada beberapa faktor diantaranya :

- Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah dari sumber/ rumah tangga (memilah sampah dari rumah)
- Minimnya fasilitas serta anggaran penanganan sampah di Kabupaten/Kota
- Belum ada teknologi pengolahan sampah di Kabupaten/Kota
- Belum adanya tenaga penyuluh lingkungan
- Kab/Kota ada yang belum menginputkan di dalam aplikasi.

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Berikut ini capaian kinerja tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah sesuai dengan dokumen perencanaan strategis organisasi (Renstra)

Tabel 3.9 Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target RPJMD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Capaian Tahun 2023	Keterangan
			Target RPJMD	Realisasi		
1.	Menurunnya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	69.73	74.26	106,16%	Sangat Tinggi
		Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah	20 %	20%	100%	Sangat Tinggi
		Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	76,75	81.81	105,71%	Sangat Tinggi
		Indeks Kualitas Air (IKA)	56,70	54.93	96,71%	Sangat Tinggi
		Indeks Kualitas Udara Ambien (IKU)	88,25	90.13	102,01%	Sangat Tinggi
		Indeks Kualitas Lahan (IKTL)	59,08	66.97	113,33%	Sangat Tinggi
		Persentase ketersediaan data Keanekaragaman Hayati di Provinsi Kepulauan Riau	28.57%	50,00%	175,01%	Sangat Tinggi
		Persentase Izin Pengelolaan Limbah B3 yang diawasi	40%	50%	125%	Sangat Tinggi
		Tingkat kepatuhan terhadap regulasi	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Persentase Kab/ Kota yang meraih Penghargaan	71.43 %	71,43 %	100 %	Sangat Tinggi
		Persentase Perusahaan yang Taat Aturan	100 %	100 %	100 %	Sangat Tinggi
		Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	71,43 %	100 %	140 %	Sangat Tinggi
		Persentase Pengurangan Sampah	27 %	18,02 %	69,28 %	Sedang
		Persentase Penanganan Sampah	72 %	72,55%	100,76 %	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Lestari	Kontribusi Sektor kehutanan terhadap PDRB Harga Berlaku	27,20	25,99	95,55%	Sangat Tinggi
		Rehabilitasi Lahan Kritis	5 Ha	302 Ha	6.040 %	Sangat Tinggi
		Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat	500 Ha	1.411	282,2 %	Sangat Tinggi
		Meningkatnya Kesehatan Daerah Aliran Sungai Kepulauan Riau	2 DAS	2 DAS	100%	Sangat Tinggi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Capaian Tahun 2023	Keterangan
			Target RPJMD	Realisasi		
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas LIngkungan Hidup dan kehutanan	Nilai SAKIP	B	BB	104,22	Sangat Tinggi

Dari tabel 3.5 di atas, pada tahun 2023 dapat dilihat realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Pada Tahun 2023 adalah 74,26 dan realisasi ini melebihi target RPJMD yang sudah ditetapkan yaitu 69,95. Sedangkan meningkatnya PDRB sektor kehutanan yang diperoleh dengan hasil capaian kinerja yaitu 25,99.

3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional (jika ada)

Berikut ini capaian kinerja tahun 2023 dengan Target Nasional sesuai dengan dokumen perencanaan strategis organisasi (Renstra)

Tabel 3.10 Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Nasional

Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja			Target RPJMD	Standar Nasional
		2021	2022	2023		
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	69.95	73.19	74.13	74.26	69.95	73,08
Meningkatnya PDRB sektor kehutanan	27,20	28,347	27,12	25,99	27,20	

Dari tabel di atas, pada tahun 2023 dapat dilihat realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Pada Tahun 2023 adalah 74,26 dan realisasi ini melebihi realisasi nasional yang yaitu 73,08. Sedangkan meningkatnya PDRB sektor kehutanan yang diperoleh dengan hasil capaian kinerja yaitu 27,13

3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Pada Tahun 2023 Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau sebesar 74,26 dari target yang ditetapkan pada RPJMD sebesar 69,95 dengan Rating Baik dengan Indeks Respon sebesar 8,32. Sehingga IKLH Provinsi Kepulauan Riau masuk peringkat ke 19 dari 38 Provinsi di Indonesia. Hasil capaian kinerja IKLH dari perhitungan 4 indikator yaitu :

- a. Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 54,93 dengan rating Sedang;

Indeks Kualitas Air (IKA) mengalami penurunan yang terjadi pada musim kemarau yang membuat volume air sungai berkurang di Kab/Kota, terjadi pencemaran air akibat pengerukan atau pemotongan tebing tanah untuk pelebaran jalan dan influent lain melalui selokan-selokan air yang ada di sekitar waduk di Batam, terbatasnya ketersediaan anggaran untuk melakukan pemantauan kualitas air.

- b. Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 90,13 dengan rating Sangat Baik;

Indeks Kualitas Udara (IKU) Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan, hasil evaluasi dari 7 kab/kota dimana berdasarkan evaluasi tersebut indeks respon daerah pada Program Langit Biru pada umumnya kab/kota tersebut memiliki kebijakan dan peraturan, SDM, serta implementasi berupa menyiapkan sarana prasarana seperti pedestrian, jalur sepeda, Ruang Terbuka Hijau (RTH), penerapan area rendah emisi (LEZ); melaksanakan program seperti Car Free Day (CFD) dan gerakan masyarakat (germas) bersepeda. Sementara itu, target dan capaian pada IKU

No	Kab/Kota	Target IKU	Capaian IKU	Kriteria
1	Kab. Bintan	88,76	93,62	Baik
2	Kab. Karimun	90,41	93,05	Baik
3	Kab. Kep. Anambas	85,55	89,37	Baik
4	Kab. Lingga	93,57	95,04	Baik
5	Kab. Natuna	86,06	89,37	Baik
6	Kota Tanjungpinang	87,84	86,37	Baik
7	Kota Batam	86,30	84,12	Baik

Data kualitas udara merupakan data hasil pengukuran langsung yang mewakili (1) area padat kendaraan (transportasi), (2) area pemukiman, (3) area perkantoran dan (4) area industri pada 7 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Pemilihan 4 lokasi yang mewakili 4 jenis aktivitas pada setiap kabupaten/kota tidak boleh berada dalam 1 lokasi yang sama, namun minimal berjarak 1 kilometer dari titik satu ke titik lainnya. Pemilihan 4 lokasi tersebut adalah:

1. Transportasi Lokasi di daerah transportasi adalah untuk mengetahui seberapa jauh dampak emisi gas buang yang keluar dari kendaraan bermotor terhadap kualitas udara disekitar jalan raya yang dilakukan pemantauan kualitas udaranya. Jarak titik pengambilan sampel kurang lebih 5 - 10 meter dari bahu jalan. Metodologi LAPORAN IKLH 2021 13.
2. Pemukiman Lokasi di daerah pemukiman dipilih untuk mengetahui tingkat pencemaran udara yang diakibatkan oleh adanya emisi gas buang yang keluar dari kegiatan di sekitar pemukiman padat.
3. Perkantoran/pasar/komersial Lokasi di daerah perkantoran/komersil adalah untuk mengetahui tingkat pencemaran udara di wilayah perkantoran/komersil akibat adanya emisi terutama bersumber dari aktivitas yang ada di sekitar lokasi atau kawasan padat perkantoran/pasar/ komersil.
4. Perkantoran/pasar/komersial Lokasi di daerah perkantoran/komersil adalah untuk mengetahui tingkat pencemaran udara di wilayah perkantoran/komersil akibat adanya emisi terutama bersumber dari aktivitas yang ada di sekitar lokasi atau kawasan padat perkantoran/pasar/ komersil. Pengukuran dilakukan secara otomatis dan atau manual dengan kriteria kualitas udara ambien rata rata tahunan. Parameter yang dipantau adalah NO₂ dan SO₂ dengan durasi pemantauan dalam setahun adalah sebagai berikut: • Passive sampler: minimal 28 hari per tahun (7 hari x 4 kali atau 14 hari x 2 kali) • Manual aktif: minimal 24 hari per tahun (2 kali per bulan @24 jam) • AQMS fixed station: minimal 65% data (238 data harian per tahun) • AQMS mobile station: minimal 20 data harian per bulan (240 data harian per tahun) Jumlah titik sampling menurut provinsi dapat dilihat pada Tabel 6. Jumlah titik sampling ini merupakan gabungan antara titik sampling menggunakan

metode passive sampler baik yang dilakukan dengan dana APBN maupun APBD ditambah dengan titik sampling pemantauan udara ambien otomatis kontinu (AQMS).

Tidak tercapainya Indeks Kualitas Udara (IKU) di Kota Batam karena adanya pembukaan Kawasan industri, penambahan ruas jalur jalan dan bertambahnya jumlah transportasi di Kota Batam sehingga menyebabkan target indeks kualitas udara di Kota Batam belum tercapai. Namun jika dilihat dari skor dan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Batam masih masuk kategori Baik. Target Indeks Kualitas Udara (IKU) yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Batam pada tahun 2022 sebesar 86,20 dengan capaian 87,71, sehingga di tahun 2023 Pemerintah Kota Batam meningkatkan target IKU sebesar 86,30 yaitu naik 0,1 dari tahun sebelumnya dengan harapan dapat tercapai seperti pada tahun sebelumnya. Keberhasilan pemantauan udara di provinsi Kepulauan Riau tidak lepas dari adanya instrumen AQMS yang difasilitasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diletakkan di 2 (dua) lokasi yaitu Kota Batam dan Kota Tanjungpinang. Air Quality Monitoring System (AQMS) adalah Alat Pemantau Kualitas Udara Otomatis untuk mengetahui tingkat pencemaran udara.

c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) sebesar 66,97 dengan rating Sedang;

Pada data Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), terdapat 7 kab/kota yang meningkat nilai IKTL. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya penambahan luas ruang terbuka hijau di Provinsi Kepulauan Riau. Seperti di Pemukiman dan Taman Kota, baik dalam bentuk taman lingkungan maupun penghijauan pekarangan. Ruang terbuka hijau permukiman yang dikelola dengan baik akan memberikan sumbangsih yang berarti pada luasan ruang terbuka hijau kota seluruhnya.

d. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) sebesar 81,81 dengan rating Baik.

Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) mengalami kenaikan karena dari 7 Kab/Kota yang dipantau dan dievaluasi, yang meningkat mutunya. Peningkatan kualitas air laut tentu tak terlepas dari adanya implementasi kebijakan seperti rehabilitasi dan restorasi pesisir seperti penanaman mangrove, partisipasi masyarakat dalam pengolahan pesisir dan laut dan tentu perbaikan di hulu, hal ini terlihat naiknya IKA

dan IKTL. Sebagaimana kita ketahui bahwa kualitas air laut dipengaruhi 80% oleh pencemaraan dan kerusakan di darat (LANDBASE POLLUTION).

Adapun realisasi IKLH 2023 sebesar 74,26 indeks sedangkan tahun 2022 sebesar 74,13 sehingga ada kenaikan 0,13 indeks dibanding tahun 2022. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun lalu pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.11 Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dan 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja 2023
1.	Menurunnya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	69,73 Indeks	74,13 Indeks	106,31 %	69,95 Indeks	74.26 Indeks	106,16%
		Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah	20 %	50 %	250 %	20 %	20 %	100%
		Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	76,75 Indeks	85,56 Indeks	111,48 %	77.39 Indeks	81.81 Indeks	105,71%
		Indeks Kualitas Air (IKA)	56,70 Indeks	56,79 Indeks	100,16 %	56,80 Indeks	54.93 Indeks	96,71%
		Indeks Kualitas Udara Ambien (IKU)	88,25 Indeks	90,27 Indeks	102,29 %	88,35 Indeks	90.13 Indeks	102,01%
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	59,08 Indeks	58,00 Indeks	98,17 %	59,09 Indeks	66.97 Indeks	113,33%

✓ **Alternative solusi yang dilakukan**

a. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)

Peningkatan kualitas air laut tentu tak terlepas dari adanya implementasi kebijakan seperti rehabilitasi dan restorasi pesisir seperti penanaman mangrove, partisipasi masyarakat dalam pengolahan pesisir dan laut dan tentu perbaikan di hulu, hal ini terlihat naiknya IKA dan IKTL. Sebagaimana kita ketahui bahwa kualitas air laut dipengaruhi 80% oleh pencemaraan dan kerusakan di darat diantaranya

disebabkan oleh :

- Pembuangan sampah di laut
- Pembuangan Limbah oleh sektor industri
- Reklamasi pantai
- Rusaknya ekosistem laut dan terumbu karang

Alternatif solusi yang dilakukan adalah dengan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mematuhi aturan dan tidak melakukan pencemaran terhadap air laut dengan cara membuang sampah dilaut. Selain itu pemerintah juga harus tegas kepada oknum atau pihak perusahaan yang melakukan pembuangan limbah yang tidak di olah atau tidak aman bagi lingkungan, serta kepada perusahaan yang melakukan kegiatan reklamasi pantai agar patuh pada peraturan yang berlaku. Pemerintah Daerah dalam hal ini baik Kabupaten/Kota juga Provinsi harus melakukan pemantauan air laut secara periodik yaitu 6 bulan sekali sesuai dengan PP Nomor 22 tahun 2021.

b. Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas Air (IKA) mengalami penurunan yang terjadi pada musim kemarau yang membuat volume air sungai berkurang di Kabupaten/Kota, terjadi pencemaran air akibat pengerukan atau pemotongan tebing tanah untuk pelebaran jalan dan influent lain melalui selokan-selokan air yang ada di sekitar waduk di Batam.

Alternatif solusi yang di lakukan agar Indeks Kualitas Air (IKA) dapat di tingkatkan yaitu dengan cara :

- Ketersediaan anggaran untuk melakukan pemantauan
- Melakukan pemantauan kualitas air sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu sebanyak 4 kali pemantau dalam setahun (PP 22 Tahun 2021)
- Pemberdayaan Instrumen Pemantauan secara online kualitas air yang ada di Sei jago di Tanjung Uban Kabupaten Bintan dan sekaligus penyediaan petugas beserta honorarium petugas jaga.

c. Indeks Kualtias Udara (IKU)

Alternatif solusi yang di lakukan untuk meningkatkan indeks kualitas udara (IKU)

adalah dengan cara :

- Pemerintah Daerah dalam hal ini baik Kabupaten/Kota juga Provinsi harus melakukan pemantauan udara secara periodik yaitu 6 bulan sekali sesuai dengan PP Nomor 22 tahun 2021.
- Melaksanakan kembali kegiatan uji emisi, karena sejak tahun 2014 uji emisi sudah tidak dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.
- Mengurangi Kendaraan Pribadi.
- Membatasi Penggunaan Pendingin Udara.
- Efisiensi Penggunaan Listrik sebagai Solusi Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca.
- Kurangi Penggunaan Plastik Sekali Pakai.

d. Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Penyediaan ruang terbuka hijau di suatu kota tidak hanya selalu dari pemerintah, seperti penyediaan taman kota, jalur hijau, dan lainnya. Namun, penyediaan ruang terbuka hijau juga dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kesadaran penghuni kota akan pentingnya ruang terbuka hijau. Berbagai jenis ruang terbuka hijau dapat dilakukan di lahan privat milik masyarakat atau swasta. Salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyediaan ruang. Selain itu pemerintah juga harus menyediakan anggaran untuk melakukan program dan kegiatan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH).

3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pencapaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja			Target RPJMD	Standar Nasional
		2021	2022	2023		
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	69.95	73.19	74.13	74.26	69.95	73,08

Pencapaian kinerja IKLH sebesar 74,26 dari target 69,95 merupakan hasil dari kegiatan dari berbagai lintas sektor.

Analisa efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian

kinerja DLHK tahun 2023 adalah :

➤ Sumber Daya Manusia (SDM) ;

Keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang menangani Lingkungan Hidup ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau sehingga perlu adanya penambahan sumber daya manusia yang sesuai dengan keahlian. Adapun jumlah sumber daya manusia yang ada saat ini sebanyak 11 (sebelas) orang yang tersebar di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebanyak 6 (enam) orang, UPTD. Laboratorium Lingkungan sebanyak 2 (dua) orang dan di Bidang persampahan, Limbah B3 dan Kajian Dampak Lingkungan 3 (tiga) orang, seperti tabel dibawah ini :

Tabel 3.12 Jumlah sumber daya manusia yang menangani Lingkungan Hidup ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL RUANG	JABATAN
1.	Roki, S.H	19840712 201001 1 021	Penata Tk.I / III.d	Kabid. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
2.	Erlangga Wisnu Wardana, S.E	19760627 200604 1 023	Penata Tk.I / III.d	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda
3	Vera Herlina, S.Sos	19881007 201101 2 008	Penata Tk.I / III.d	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda
4	Axsal, SKM., M.Kes	19800524 200604 1 012	Penata Muda Tk.I / III.b	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda
5	Iran Andrianto, S.E	19790615 201101 1 004	Penata Tk.I / III.d	Penelaah Dampak Lingkungan
6.	Cici Septiarini, S.Si.	19851117 201101 2 009	Penata Tk.I / III.d	Analisis Lingkungan Hidup
7.	Mardinayanti, S.Si.	19840331 201101 2 011	Penata Muda Tk.I / III.b	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama
8	Milya Hariza, S.T.P.	19761223 201101 2 002	Penata Muda / III.a	Pengendali Dampak Lingkungan Mahir
9.	Rupi'ah, S.P.	19730315 200502 2 006	Penata Tk.I / III.d	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda
10.	Raden Mariadi N, S.P.	19841105 200904 1 002	Penata Tk.I / III.d	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda
11.	Said Syahro Marfandy, S.E.	19751019 201001 1 007	Penata Tk.I / III.d	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda

➤ Sarana

Saat ini sarana yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau diantaranya adalah :

1. AQMS mobile station

AQMS mobile station yang ada saat ini ada 2 (dua) lokasi yaitu 1 (satu) di Kota

batam tepatnya di batua Aji dan 2 (dua) di Kota Tanjungpinang yang terletak di Pamedan.

2. UPTD. Laboratorium Lingkungan

Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau di Jalan Pramuka No.7B Sekupang – Batam. UPTD. Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah di dukung dengan instrumen atau peralatan untuk pengujian kualitas air, baik air bersih maupun air laut.

3.1.8 Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pelaksanaan program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat dengan pagu anggaran Rp. 250.000.000,- yang dialokasikan untuk penganugrahan dan penyerahan sertifikat Penghargaan Perusahaan yang taat terhadap peraturan pengelolaan lingkungan hidup pada periode penilaian tahun 2021 - 2022 serta dilakukan inspeksi ke lapangan kepada perusahaan peserta program penilaian peringkat kinerja perusahaan periode tahun 2022 – 2023, Program Pengelolaan persampahan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 246.147.805,- dialokasikan untuk pengelolaan sampah berupa pemberian bantuan kepada 8 (delapan) kelompok bank sampah yaitu 6 (enam) kelompok bank sampah di Kab. Lingga, 1 (satu) kelompok di Kab. Bintan dan 1 (satu) di Kota Tanjung Pinang.

Program pengelolaan hutan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 297.035.500,- dialokasikan untuk pengawasan supaya hutan tersebut tetap lestari dan tidak dirusak oleh masyarakat dan penanaman mangrove seluas 2 (dua) Hektar di Batam. Maka capaian kinerja IKLH Tahun 2023 sebesar 74,26 dari target 69,95 dari program yang langsung mengampu indikator tersebut belum ada tetapi program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai pendukung atas keberhasilan seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.13 Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian Kinerja Tahun 2023

No	Program/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi	
			(Rp.)	(%)
1	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	250.000.000	228.935.899	91,57
1.1	Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	250.000.000	228.935.899	91,57
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	246.147.805	227.572.050	92,45
2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	246.147.805	227.572.050	92,45
3	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	297.035.500	287.461.100	96,78
3.1	Sub Kegiatan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	297.035.500	287.461.100	96,78
JUMLAH		793.183.305	743.969.049	93,80

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau melalui APBD tahun anggaran 2023 mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar **32.531.280.156,-** yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 32.043.184.950,- (meliputi Belanja Pegawai Sebesar Rp. 25.746.615.927,- Belanja Barang dan Jasa Rp. 5.766.569.023,- serta Belanja Hibah Rp. 530.000.000,-) dan belanja modal sebesar Rp. 488.095.206,- yang dijabarkan dalam beberapa urusan program dan kegiatan. Realisasi belanja tersebut secara keseluruhan adalah sebesar **Rp. 31.487.472.944,-** atau sebesar 96,79%, dan dapat dirinci pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2.1 Realisasi Anggaran

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Pegawai	25.746.615.927,00	25.105.914.691,00	97.51	639.366.836,00
2	Belanja Barang dan Jasa	5.766.569.023,00	5.394.280.253,00	93,54	372.288.770,00
3	Belanja Hibah	530.000.000,00	530.000.000,00	100,00	530.000.000,00
4	Belanja Modal	488.095.206	457.278.000,00	93,69	30.817.206,00
JUMLAH		32.531.280.156,00	31.487.472.944,00	96,79	30.817.206,00

Dengan capaian realisasi Belanja Pegawai sebesar 25.105.914.691,- (97.51%), Belanja Barang dan Jasa sebesar 5.394.280.253,- (93,54%), Belanja Hibah sebesar Rp. 530.000.000,- (100,00%) serta Belanja Modal sebesar 457.278.000,- (93,69%), maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau telah mampu mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) dengan capaian realisasi anggaran di atas 90%.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tingkat pencapaian kinerja dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 ini, berikut disajikan tabel Ikhtisar Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan persentase tingkat capaian sebagai berikut:

Tabel 3.2.2: Ikhtisar Realisasi Belanja Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Tk Capaian
Belanja Pegawai	25.746.615.927,00	25.107.249.091,00	97.51%
Jumlah Belanja Pegawai	25.746.615.927,00	25.107.249.091,00	97.51%

Merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Terdiri dari Gaji Pokok PNS dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS, dan Honorarium Non PNS. Dengan rincian sebagai berikut:

- Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

Dengan total anggaran sebesar **6.443.898.000,00** dan realisasi sebesar **6.325.287.500,00** atau setara dengan **98.16 %** dan terdapat sisa pagu anggaran **118.610.500,00**.

- Tunjangan Keluarga

Dengan total anggaran sebesar **647.017.978,00** dan realisasi sebesar **634.100.332,00** atau setara dengan **98.00%** dan terdapat sisa pagu anggaran **12.917.646,00**.

- Tunjangan Jabatan 353.374.000,00 dan realisasi sebesar 350.000.000,00 atau setara dengan 99.05% dan terdapat sisa pagu anggaran 3.374.000,00.

Tunjangan Fungsional

Dengan total anggaran sebesar **361.492.200,00** dan realisasi sebesar **354.298.000,00** atau setara dengan **98.01%** dan terdapat sisa pagu anggaran **7.194.200,00**.

- Tunjangan Umum

Dengan total anggaran sebesar **132.114.000,00** dan realisasi sebesar **129.310.000,00** atau setara dengan **97,88%**. dan terdapat sisa pagu anggaran **2.804.000,00**.

- Tunjangan Beras

Dengan total anggaran sebesar **417.240.588,00** dan realisasi sebesar **409.535.100,00** atau setara dengan **98.15%** dan terdapat sisa pagu anggaran **7.705.488,00**.

- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

Dengan total anggaran sebesar **4.235.331,00** dan realisasi sebesar **4.192.490,00** atau setara dengan **98.99%** dan terdapat sisa pagu **42.841,00**.

- Pembulatan Gaji

Dengan total anggaran sebesar **104.941,00** dan realisasi sebesar **102.934,00** atau setara dengan **98,09%**.

- Iuran Jaminan Kesehatan ASN

Dengan total anggaran sebesar **703.279.055,00** dan realisasi sebesar **684.043.612,00** atau setara dengan **97.26%** dan terdapat sisa pagu anggaran **19.235.443,00**.

- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN

Dengan total anggaran sebesar **13.284.475,00** dan realisasi sebesar **12.999.813,00** atau setara dengan **97.86%** dan terdapat sisa pagu anggaran **284.662,00**.

- Iuran Jaminan Kematian ASN
Dengan total anggaran sebesar **39.853.944,00** dan realisasi sebesar **38.999.951,00** atau setara dengan **97,86%**.
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS
Dengan total anggaran sebesar **7.431.385,00** dan realisasi sebesar **7.219.228.625,00** atau setara dengan **97.15%** dan terdapat sisa pagu anggaran **212.157.213,00**.
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas PNS
Dengan total anggaran sebesar **735.155.155,00** dan realisasi sebesar **718.451.453,00** atau setara dengan **97.73%** dan terdapat sisa pagu anggaran **16.703.702,00**.
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS
Dengan total anggaran sebesar **1.223.647.805,00** dan realisasi sebesar **1.189.918.828,00** atau setara dengan **97.24%** dan terdapat sisa pagu anggaran **33.728.977,00**.
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja
Dengan total anggaran sebesar **6.701.890.617,00** dan realisasi sebesar **6.499.834.053,00** atau setara dengan **96.99%** dan terdapat sisa pagu anggaran **202.056.564,00**.
- Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
Dengan total anggaran sebesar **538.642.000,00** dan realisasi sebesar **535.612.000,00** atau setara dengan **99.44%** dan terdapat sisa pagu anggaran **3.030.000,00**.

Tabel 3.2.3 : Ikhtisar Realisasi Belanja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Tk Capaian
Belanja Operasi Belanja Pegawai	25.746.615.927,00	25.107.249.091,00	97,51
Belanja Barang dan Jasa	5.766.569.023	5.394.280.253,00	93,54
Belanja Hibah	530.000.000,00	530.000.000,00	100,00
Belanja Modal	488.095.206	457.278.000,00	93,69
Jumlah Belanja Langsung	32.531.280.156,00	31.487.472.944,00	96,79

Merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah serta belanja modal.

Berikut ini akan dibahas uraian tentang anggaran definitif masing-masing kegiatan yang termasuk dalam komponen biaya langsung yaitu:

I. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Tk Capaian
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	144.763.056,00	141.456.905,00	97,72
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	78.576.756,00	75.417.417,00	95,98
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66.186.300,00	66.039.488,00	99,78
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.746.615.927,00	25.107.249.091,00	97,52
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.207.973.927,00	24.571.637.091,00	97,48
	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	538.642.000,00	535.612.000,00	99,44
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80.306.843,00	74.878.243,00	93,24
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	80.306.843,00	74.878.243,00	93,24
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	794.409.000,00	784.126.037,00	100,00

	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kanto	5.997.300,00	4.716.000,00	78,64
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21.205.200	19.066.800,00	89,92
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66.788.400,00	63.426.200,00	99,45
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	64.417.900,00	64.060.500,00	99,45
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	122.313.600,00	121.680.000,00	99,48
	- Fasilitas Kunjungan Tamu	20.253.800,00	19.167.000,00	94,63
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	486.843.000,00	485.435.537,00	99,71
	- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6.589.800,00	6.574.000,00	99,76
5	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	410.249.000,00	404.321.700,00	98,56
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	364.909.000,00	360.416.700,00	98,77
	- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	45.340.000,00	43.905.000,00	96,84
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.087.677.624,00	2.033.182.724,00	97,39
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.497.000,00	10.009.250,00	80,09
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.072.980.024,00	2.020.973.474,00	97,49
TOTAL		29.264.021.450,00	28.545.214.700,00	97,19

Dengan total anggaran sebesar **Rp. 29.264.021.450,00** dan realisasi sebesar **Rp. 28.545.714.700,00** atau setara dengan **97,19%** Terdiri dari 1 (Isatu) kegiatan dengan capaian rata-rata di atas 90% sehingga perlu peningkatan serapan di tahun 2024 dan rekomendasinya yaitu berkoordinasi dengan pejabat keuangan tentang syarat-syarat pencairan, perencanaan jika ada perubahan belanja dan internal bidang.

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Tk Capaian
1	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	439.140.835,00	399.828.064,00	91,05
	- Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	439.140.835,00	399.828.064,00	91,05
TOTAL		439.140.835,00	399.828.064,00	91,05

Dengan total anggaran sebesar **Rp. 439.140.835, 00** dan realisasi sebesar **Rp. 399.828.064,00** atau setara dengan **91.05%** dan terdapat sisa pagu anggaran **Rp. 39.312.771,00**.

3. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Tk Capaian
1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	55.240.700,00	43.960.694,00	79,58
	- Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	55.240.700,00	43.960.694,00	79,58
TOTAL		55.240.700,00	43.960.694,00	79,58

Dengan total anggaran sebesar **Rp. 55.240.700, 00** dan realisasi sebesar **Rp. 43.960.694,00** atau setara dengan **79.58%** dan terdapat sisa pagu anggaran **Rp. 11.280.006,00** sehingga perlu peningkatan serapan di tahun 2024 dan rekomendasinya yaitu berkoordinasi dengan pejabat keuangan tentang syarat-syarat pencairan, perencanaan jika ada perubahan belanja dan internal bidang.

4. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Tk Capaian
1	Pemberin Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	250.000.000,00	228.935.899,00	91.57
	- Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	250.000.000,00	228.935.899,00	91.57
TOTAL		250.000.000,00	228.935.899,00	91.57

Dengan total anggaran sebesar **Rp. 250.000.000,00** dan realisasi sebesar **Rp. 228.935.899,00** atau setara dengan **91.57%** dan terdapat sisa pagu anggaran **Rp. 21.064.101,00**.

5. Program Pengelolaan Persampahan

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Tk Capaian
1	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	246.147.805,00	227.572.050,00	92.45
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	246.147.805,00	227.572.050,00	92.45
TOTAL		246.147.805	227.572.050	94.45

Dengan total anggaran sebesar **Rp. 246.147.805,00** dan realisasi sebesar **Rp. 227.572.050,00** atau setara dengan **94.45%** dan terdapat sisa pagu anggaran **Rp. 18.575.755,00**. Terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan capaian di atas 90,45% atau berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan.

6. Program Pengelolaan Hutan

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Tk Capaian
1	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	109.100.192,00	102.605.000,00	94,05
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	87.393.676,00	83.083.500,00	95,07
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	21.706.516,00	19.512.500,00	89,93
2	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	297.035.500,00	287.461.100,00	96,78
	- Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	297.035.500,00	287.461.100,00	96,78
3	Pelaksanaan Pengelolaan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	38.499.787,00	32.686.900,00	84,90
	- Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	38.499.787,00	32.686.900,00	84,90
4	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	27.812600	20.709.000	74,46
	- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan / Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	27.812600	20.709.000	74,46
TOTAL		472.448.079,00	443.462.000,00	87,55

Dengan total anggaran sebesar **Rp. 472.448.079,00** dan realisasi sebesar **Rp. 443.462.000,00** atau setara dengan **87,55%** sehingga perlu peningkatan serapan di tahun 2024 dan rekomendasinya yaitu berkoordinasi

dengan pejabat keuangan tentang syarat-syarat pencairan, perencanaan jika ada perubahan belanja dan internal bidang.

7. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Tk Capaian
1	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	698.494.000,00	636.152.259,00	91.07
	- Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	323.577.100,00	299.499.896,00	92.56
	- Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	374.916.900,00	336.652.363,00	89.79
TOTAL		698.494.000,00	636.152.259,00	91.07

Dengan total anggaran sebesar **Rp. 698.494.000,00** dan realisasi sebesar **Rp. 636.152.259,00** atau setara dengan **91.07%** dan terdapat sisa pagu anggaran **Rp. 62.341.741,00**.

8. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Tk Capaian
1	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	35.906.000,00	28.948.400,00	80.62
	- Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	35.906.000,00	28.948.400,00	80.62
TOTAL		35.906.000,00	28.948.400,00	80.62

Dengan total anggaran sebesar **Rp. 35.906.000,00** dan realisasi sebesar **Rp. 28.948.400,00** atau setara dengan **80.62%** dan terdapat sisa pagu anggaran **Rp. 6.957.600,00**. Terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan capaian 80,62% sehingga perlu peningkatan serapan di tahun 2024 dan rekomendasinya yaitu berkoordinasi dengan pejabat keuangan tentang syarat-syarat pencairan, perencanaan jika ada perubahan belanja dan internal bidang.

II. UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN

9. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Tk Capaian
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	380.532.712	346.900.323	100,00
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.994.800	2.994.800	100,00
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	214.167.060	191.074.000	89,22
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	32.873.200	30.459.600	92,66
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.287.800	15.527.200	95,33

	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.164.386	2.122.686	98,07
	- Penyediaan Bahan/Material	62.300.166	57.416.900	92,16
	- Fasilitas Kunjungan Tamu	8.250.000	8.125.000	98,48
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41.495.300	39.180.500	94,42
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.602.700	81.266.637	96,75
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.911.900	30.266.637	94,84
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.690.800	51.000.000	98,66
3	Kepegawaian Perangkat Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
TOTAL		489.135.412	453.167.323	92.65

Dengan total anggaran sebesar **Rp. 489.135.412,00** dan realisasi sebesar **Rp. 453.167.323,00** atau setara dengan **92.65%** dan terdapat sisa pagu anggaran **Rp. 35.968.089,00**. Terdapat satu sub kegiatan yang serapan anggarannya dibawah 90% pada sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor . Adapun tindaklanjutnya adalah serapan anggaran yang lebih baik lagi di tahun 2024 sehingga rekomendasinya adalah PPTK berkoordinasi aktif dengan internal bidang, pejabat keuangan dan perencanaan.

III. UPTD KPHP UNIT I Karimun

10. Program Pengelolaan Hutan

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Tk Capaian
1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	37.284.200,00	15.760.600,00	38,29
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	0	0
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.494.400	2.464.000	98,78
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.714.800	10.650.600	77,66
	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	830.000	0	0
	- Penyediaan Bahan/Material	1.475.000	1.200.000	81,36
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.130.000	1.446.000	10,23

2	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.792.500,00	33.074.750,00	91,72
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.042.500	13.654.750	85,12
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.750.000	19.420.000	98,33
1	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
	- Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
2	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	6.179.000,00	6.179.000,00	100,00
	- Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	6.179.000,00	6.179.000,00	100,00
TOTAL		83.755.700,00	59.514.350,00	71,06

Dengan total anggaran sebesar **Rp. 83.755.700,00** dan realisasi sebesar **Rp. 59.514.350,00** atau setara dengan **71,06%** dan terdapat sisa pagu anggaran **Rp. 24.241.350.** ada beberapa sub kegiatan yang tidak terserap secara maksimal yaitu : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Logistik Kantor dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Adapun tindaklanjutnya adalah serapan anggaran yang lebih baik lagi di tahun 2024 sehingga rekomendasinya adalah PPTK berkoordinasi aktif dengan internal bidang, pejabat keuangan dan perencanaan.

IV. UPTD KPHL II BATAM

11. Program Pengelolaan Hutan

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Tk Capaian
1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	39.487.455	37.846.050	92,55
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	2.003.200	1.672.000	83,47
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.335.500	4.880.000	91,46
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.496.100	202.100	80,97
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.014.800	15.002.450	99,92
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	911.700	870.000	95,43
	- Penyediaan Bahan/ Material	919.155	864.500	94,05
	- Fasilitas Kunjungan Tamu	2.772.000	2.688.000	96,97
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.035.000	9.848.000	98,14
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.080.000	40.020.832	98,24
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	100
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.830.000	19.270.832	97,18
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.250.000	19.750.000	97,53
3	Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00

	- Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH (UPTD KPHL Unit II Batam)	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00
2	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	5.250.000,00	5.250.000,00	100,00
	- Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan (UPTD KPHL Unit II Batam)	5.250.000,00	5.250.000,00	100,00
TOTAL		88.517.45500	85.816.882,00	96,95

Dengan total anggaran sebesar **Rp. 88.517.45500,00** dan realisasi sebesar **Rp. 85.816.882,00** atau setara dengan **96.95%** dan terdapat sisa pagu anggaran **Rp. 2.700.573**. Sebagian sub kegiatan serapan anggaran dibawah 85% yaitu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. Adapun tindaklanjutnya adalah serapan anggaran yang lebih baik lagi di tahun 2024 sehingga rekomendasinya adalah PPTK berkoordinasi aktif dengan internal bidang, pejabat keuangan dan perencanaan.

V. UPTD KPHP UNIT III LINGGA

12. Program Pengelolaan Hutan

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Tk Capaian
1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	32.914.676	20.562.400	79,60
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.405.276	10.848.000	62,33
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	825.000	825.000	100
	- Penyediaan Bahan/Material	1.497.400	1.497.400	100
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.187.000	7.392.000	56,06

2	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.311.485	754.680	57,54
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.311.485	754.680	57,54
3	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan provinsi	0	0	0
	- Ppenyediaan dan pemeliharaan sarana Prasarana Operasionalisasi KPH (UPTD KPHL Unit II Batam)	0	0	0
4	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	0	0	0
	- Pencegahan dan Pembatasan kerusakan Hutan (UPTD KPHL Unit II Batam)	0	0	
TOTAL		34.226.161,00	21.317.080,00	68,57

Dengan total anggaran sebesar **Rp. 34.226.161,00** dan realisasi sebesar **Rp. 21.317.080** atau setara dengan **68.57%** dan terdapat sisa pagu anggaran **Rp. 12.909.081.** ada beberapa sub kegiatan yang serapan anggaran belum maksimal dibawah 65% yaitu : Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Adapun tindaklanjutnya adalah serapan anggaran yang lebih baik lagi di tahun 2024 sehingga rekomendasinya adalah PPTK berkoordinasi aktif dengan internal bidang, pejabat keuangan dan perencanaan.

VI. UPTD KPHP UNIT IV BINTAN-TANJUNGPINANG

13. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Tk Capaian
1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.794.503,00	12.685.100,00	99,14
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.075.800,00	27.280.750,00	97,17
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.530.000,00	15.134.000,00	97,45
2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.205.600	28.857.500	98,81
TOTAL		85.605.903,00	83.957.350,00	98,07

Dengan total anggaran sebesar **Rp. 85.605.903,00** dan realisasi sebesar **Rp. 83.957.350,00** atau setara dengan **98,07%**. dan terdapat sisa pagu anggaran **Rp. 1.648.553**. Seluruh sub kegiatan anggarannya terserap diatas 95 % sehingga serapan perlu di pertahankan atau di tingkatkan untuk tahun 2024.

VII. UPTD KPHP UNIT V NATUNA

14. Program Pengelolaan Hutan

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Tk Capaian
1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.021.000	560.000	27,71
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.241.600	3.358.150	64,07
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.503.300	2.417.000	96,55
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.246.100	12.698.200	95,86
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	984.300	900.000	91,44
	- Penyediaan Bahan/Material	1.499.955	1.454.250	96,95
	- Fasilitas Kunjungan Tamu	4.950.000	4.406.000	89,01
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.226.000	5.756.170	40,46
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	100
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.074.400	9264088	46,15
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.786.000	65.716.500	94,17

3	Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung			
	- Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH (UPTD KPHL Unit V Natuna)	2.900.656	2.756.800	95,04
4	Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			
	- Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	5.388.604	5.267.150	97,75
TOTAL		143.821.915	115.554.308	80.35

Dengan total anggaran sebesar **Rp. 143.821.915,00** dan realisasi sebesar **Rp. 115.554.308,00** atau setara dengan **80,35%** dan terdapat sisa pagu anggaran **Rp. 28.267.607,00**. Ada beberapa sub kegiatan yang tidak terserap secara maksimal atau dibawah 65% yaitu : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Adapun tindaklanjutnya adalah serapan anggaran yang lebih baik lagi di tahun 2024 sehingga rekomendasinya adalah PPTK berkoordinasi aktif dengan internal bidang, pejabat keuangan dan perencanaan.

VIII. UPTD KPHP UNIT IV KEPULAUAN ANAMBAS

15. Program Pengelolaan Hutan

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Tk Capaian
1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.108.700	0	0

	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.460.100	0	0
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.392.000	0	0
	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.262.956	0	0
	- Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.920.000	0	0
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.826.000	8.756.000	59,06
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	999.100	0	0
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.324.200	18127900	93,81
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.000.800	80.000.000	99,99
3	Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung			
	- Ppenyediaan dan pemeliharaan sarana Prasarana Operasionalisasi KPH (UPTD KPHP Unit VI Anambas)	2.892.035	2.890.635	99,95
4	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			
	- Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	5.632.850	5.631.450	99,98
TOTAL		144.818.741	115.405.985	90.36

Dengan total anggaran sebesar **Rp. 144.818.741,00** dan realisasi sebesar **Rp. 115.405.985,00** atau setara dengan **79.69%** dan terdapat

siswa paku anggaran **Rp. 29.412.756,00**. Ada beberapa enam sub kegiatan yang tidak terserap dan satu sub kegiatan yang serapannya rendah yaitu 59,06% sehingga perlu adanya tindak lanjut untuk perbaikan serapan di tahun 2024 dan rekomendasinya adalah PPTK berkoordinasi secara aktif dengan internal bidang, pejabat keuangan dan perencanaan.

Tabel 3.2.4 Realisasi Anggaran Tahun 2023 Berdasarkan Program

No	Program	Anggaran			Realisasi Fisik (%)	Capaian Kinerja Program (%)
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Anggaran (%)		
1.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	439.140.835,00	399.828.064,00	91,05	100	100
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	30.298.459.592,00	29.444.772.943,00	97,19	100	100
3.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	250.000.000,00	228.935.899,00	92,00	100	100
4.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	55.240.700,00	43.960.694,00	79,58	100	100
5.	Program Pengelolaan Persampahan	246.147.805,00	227.572.050,00	92,45	100	100
6.	Program Pengelolaan Hutan	507.891.224,00	487.637.035,00	87,55	100	100
7.	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	698.494.000,00	636.152.259,00	91,07	100	100
8.	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	35.906.000,00	28.948.400,00	80,62	100	100
	Jumlah	32.531.280.156,00	31.488.807.344,00	96,80	100	100

Tabel 3.2.5 Realisasi Anggaran Per Sasaran

Indikator	Program	Kegiatan	Capaian Kinerja Anggaran			Capaian indikator (%)
			Anggaran	Realisasi	%	
Sasaran ke-1 : Menurunnya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup						
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	439.140.835	399.828.064	91,05	100
		Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	439.140.835	399.828.064	91,05	100
	2. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	1. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	55.240.700	43.960.694	79,58	100
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	55.240.700	43.960.694	79,58	100
	3. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	250.000.000	228.935.899	91,57	100
		Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	250.000.000	228.935.899	91,57	100
	4. Program Pengelolaan Persampahan	2. Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	472.448.079	227.572.050	92,45	100
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	472.448.079	227.572.050	92,45	100
Sasaran ke-2 : Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Lestari						
Persentase Kontribusi sektor kehutanan terhadap	1. Program Pengelolaan Hutan	1. Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	109.100.192,00	102.605.000,00	94,05	100
		- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	87.393.676	83.083.500	95,05	100

PDRB		- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	21.706.516	19.5215.00	89,93	100
		2. Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	297.035.500,00	287.461.100,00	96,78	100
		- Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	297.035.500	287.461.100	96,78	100
		3. Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	38.499.787,00	32.686.900,00	84,90	100
		- Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	38.499.787	38.686.900	84,90	100
		4. Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	27.812.600,00	20.709.000,00	74,46	100
		- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan / Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	27.812.600	20.709.000	74,46	100
		5, Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	12.992.691,00	12.847.435	98,88	100
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH (UPTD KPHP UNIT I KARIMUN)	4.500.000	4.500.000	100	100
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH (UPTD KPHL UNIT II BATAM)	2.700.000	2.700.000	100	100
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH (UPTD KPHP UNIT V NATUNA)	2.900.656	2.756.800	95,04	100
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH (UPTD KPHP UNIT VI ANAMBAS)	2.892.035	2.890.635	99,98	100
		5. Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	22.450.454	22.327.600	99,45	100
		- Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan di KPH (UPTD KPHP UNIT I KARIMUN)	6.179.000	6.179.000	100	100
		- Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan di KPH (UPTD KPHL UNIT II BATAM)	5.250.000	5.250.000	100	100
		- Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan di KPH (UPTD KPHP UNIT III LINGGA)	0	0	0	0
		- Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan di KPH (UPTD KPHP UNIT IV BINTAN-TPI)	0	0	0	0
		- Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan di KPH (UPTD KPHP UNIT V NATUNA)	5.388.604	5.267.150	97,75	100
		- Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan di KPH (UPTD KPHP UNIT VI ANAMBAS)	5.632.850	5.631.450	99,98	100

Sasaran ke-3 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan						
Nilai SAKIP	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	144.763.056	141.456.905	97,72	100
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	78.576.756	75.417.417	94,03	100
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66.186.300	66.039.488	99,92	100
		2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.746.615.927	25.107.249.091	98,52	100
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25207973927	24.571.637.091	98,53	100
		Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	538.642.000	535.612.000	97,69	100
		3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	794.409.000	784.126.037	98,71	100
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.997.300	4.716.000	78,64	100
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21.205.200	19.066.800	89,92	100
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66.788.400	63.426.200	94,97	100
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	64.417.900	64.060.500	99,45	100
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	122.313.600	121.680.000	99,48	100
		Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	20.253.800	19.167.000	94,63	100
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	486.843.000	485.435.537	99,71	100
		Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6.589.800	6.574.000	99,76	100
		4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.087.677.624	2.033.182.724	97,39	100
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.200.000	2.200.000	100	100
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.497.600	10.009.250	80,09	100
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.072.980.024	2.020.973.474	97,56	100
		5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	410.249.000	404.321.700	98,56	100
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	364.909.000	360.416.700		100
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.340.000	43.905.000	93,24	100
		6. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80.306.843	74.878.243	93,24	240
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN)	80.306.843	74.878.243	93,24	240

Secara umum akuntabilitas keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau dapat dijelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau melalui APBD tahun anggaran 2023 mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar 32.531.280.156,- dengan realisasi belanja sebesar Rp. 31.487.472.944,- atau 96,79% dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 1.043.807.212,-

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu :

1. Menurunnya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
2. Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Lestari
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan

BAB 4

PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 disusun sebagai wujud akuntabilitas kinerja atas tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan serta sasaran dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang Baik.

Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai keberhasilan pencapaian sasaran maupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi dan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dituangkan kedalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan dengan penggunaan anggaran yang tersedia.

Anggaran Belanja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau yang tersedia melalui APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 32.531.280.156,-(Tiga Puluh Dua milyar Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu seratus lima puluh enam Rupiah) dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Lestari, serta Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.

4.1 Kesimpulan

Hasil analisis yang telah dilakukan pada Bab 3 dan dengan mempertimbangkan capaian realisasi indikator kinerja, didapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Sasaran strategis meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang tercakup dalam 8 program, 16 kegiatan dan 35 sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2023 yang dapat dicapai dengan capaian 106,31 % dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 74,26 atau kategori "Sangat Baik".
2. Sedangkan untuk sasaran meningkatnya Pemanfaatan Hutan Lestari dengan indikator Kontribusi Sektor kehutanan terhadap PDRB Harga Berlaku tercapai 27,13 dengan capaian kinerja 99,74% atau kategori "Baik" dan merupakan angka sementara karena angka tetap belum rilis dari BPS Provinsi Kepulauan Riau dan rilis PDRB sektor Kehutanan Tahun 2023 di akhir bulan Februari 2023.

4.2 Saran

Saran yang dapat diberikan atas kesimpulan hasil analisis pada Bab 3 adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau perlu dipertahankan dan tetap meningkatkan performa kinerja agar target akhir periode RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 tetap lebih baik.
2. Perlu dilakukannya pemenuhan anggaran untuk sasaran strategis yang belum tercapai
3. Pendanaan untuk Indikator Kinerja Utama sebaiknya tidak dilakukan refocusing karena mengingat hal tersebut merupakan indikator kinerja kepala Dinas yang membawa nama OPD tersebut.
4. Anggaran untuk pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebaiknya dilakukan review kembali mengingat selama ini anggaran yang diberikan tidak sesuai dengan persyaratan frekuensi pemantauan yang sesuai

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Demikian, semoga laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau kepada Gubernur Kepulauan Riau selaku Kepala Daerah atau pihak lainnya yang berkepentingan sebagai sumber informasi secara transparan sehingga dapat memberikan umpan balik dalam rangka pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau dimasa mendatang.

Tanjungpinang, Februari 2024

Kepala Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Kepulauan Riau,



HENDRI, S.T

Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19710501 200312 1 008